

BAB II

KAJIAN LITERATUR YANG RELEVAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, sehingga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Kerentanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti letak tektonik dan vulkanik, tetapi juga oleh faktor sosial dan kependudukan, mengingat Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dengan dinamika sosial yang kompleks.

2.1. Bencana

Untuk memahami secara menyeluruh konteks kebencanaan di Indonesia, penting untuk merujuk pada definisi formal mengenai bencana sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini menjadi dasar konseptual dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam definisi di atas disebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

1. Bencana Alam

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

2. Bencana Non Alam

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

2.1.1. Potensi Ancaman Bencana

Bencana bisa disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

1. Menurut UN-ISDR (2004), bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazard*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazard*), bahaya biologi (*biological hazard*), bahaya teknologi (*tecnological hazard*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).

2. Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana.
3. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

2.1.2. Jenis Bencana

Menurut Maharani (2017) berdasarkan penyebabnya, bencana alam diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bencana Alam Geologi

Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan tanah longsor.

2. Bencana Alam Klimatologi

Bencana alam klimatologi atau disebut juga bencana alam meteorologi/hidrometeorologi merupakan bencana alam yang disebabkan oleh iklim atau angin dan hujan. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir, badai, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran alami hutan yang bukan disebabkan oleh manusia. Gerakan tanah atau longsor juga termasuk bencana alam, walaupun pemicu utamanya adalah faktor klimatologi (hujan), tetapi gejala awalnya dimulai dari kondisi geologis (jenis dan karakteristik tanah serta batuan dan sebagainya).

3. Bencana Alam Ekstra-Terrestrial

Bencana alam ekstra-terrestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid, gangguan badai matahari, atau hantaman meteor. Bila hantaman benda-benda langit mengenai permukaan bumi maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi.

2.1.3. Penanggulangan Bencana

Menurut Maharani (2017), secara umum penanggulangan bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pencegahan sebelum bencana atau pra bencana, penanggulangan saat bencana, dan sesudah terjadinya bencana atau pasca bencana.

1. Pra Bencana

Ada dua hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana yakni kesiapsiagaan dan mitigasi. Kesiapsiagaan terdiri dari kegiatan membuat sistem peringatan dini, menyusun cara pemeliharaan logistik dan melakukan pelatihan terhadap personil tim penyelamat. Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan tentang rute evakuasi, serta langkah-langkah dalam proses pencarian dan penyelamatan korban bencana. Semua kegiatan tersebut dilakukan saat pra bencana dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya korban jiwa dan kerusakan saat bencana.

Sementara kegiatan-kegiatan yang termasuk mitigasi adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan skala bencana yang diprediksi terjadi di masa yang akan datang. Kegiatan mitigasi ini memfokuskan pada bahaya atau ancaman bencana itu sendiri. Misalnya, membangun rumah yang

tahan terhadap gempa bumi, membuat sistem pengairan di daerah yang sering dilanda bencana kekeringan, dan penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

2. Saat Bencana

Ketika bencana alam sedang berlangsung, ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh tim penyelamat. Serangkaian kegiatan tersebut meliputi penyelamatan dan evakuasi korban serta harta bendanya (termasuk binatang ternak/peliharaan), memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana, memberikan perlindungan, pengurusan pengungsi, serta menyelamatkan dan memperbaiki prasarana.

3. Pasca Bencana

Saat setelah terjadinya bencana adalah waktu yang perlu diperhatikan karena bencana menimbulkan dampak setelahnya. Secara umum, kegiatan yang dapat dilakukan setelah terjadinya bencana ada dua yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan usaha untuk memperbaiki dan memulihkan semua bidang pelayanan publik sehingga dapat digunakan atau berfungsi kembali. Bidang pelayanan publik yang harus diperbaiki meliputi bidang pemerintahan di daerah bencana sampai dengan kehidupan masyarakatnya.

Sementara rekonstruksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali semua sarana dan prasarana, serta kelembagaan di daerah yang terkena bencana. Rekonstruksi ini dilakukan mulai dari tingkat pemerintahan sampai masyarakat. Sasaran utama dari kegiatan rekonstruksi

yakni bertumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya ketertiban dan hukum yang berlaku, serta bangkitnya keterlibatan masyarakat dalam aspek kehidupan.

2.1.4. Kesiapsiagaan Bencana

Pemahaman pentingnya kesiapsiagaan sebagai bagian integral dari penanggulangan bencana, perlu merujuk pada landasan hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut. Salah satu regulasi utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang memberikan definisi dan penjelasan menyeluruh mengenai kesiapsiagaan dalam konteks kebencanaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa:

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana yang pada dasarnya merupakan semua upaya dan kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana alam untuk secara tepat dan efektif merespon keadaan atau situasi pada saat bencana dan segera setelah bencana.

Definisi tersebut menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan teknis menjelang terjadinya bencana, tetapi juga mencakup proses pengorganisasian masyarakat dan perencanaan yang sistematis. Kesiapsiagaan berperan penting dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana melalui langkah-langkah proaktif yang dilakukan secara terstruktur sebelum bencana terjadi.

2.1.5.1. Tujuan Kesiapsiagaan Bencana

Menurut Yayasan IDEP (2007) kesiapsiagaan terhadap bencana mempunyai beberapa tujuan utama yaitu:

1. Mengurangi Ancaman

Secara alamiah, bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi sulit dihindari. Namun, melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, manusia dapat mengurangi ancaman kerentanan terhadap bencana tersebut. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pada pengurangan risiko dan dampak yang ditimbulkan.

2. Mengurangi Kerentanan Masyarakat

Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. Masyarakat yang pernah dilanda bencana dapat mempersiapkan diri dengan melakukan kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan evakuasi, penyelamatan serta mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana.

3. Mengurangi Dampak

Untuk mengurangi dampak suatu ancaman, masyarakat perlu mempunyai persiapan agar cepat bertindak apabila terjadi bencana. Umumnya pada semua kasus bencana, masalah utama adalah penyediaan air bersih. Akibatnya banyak masyarakat yang terjangkit penyakit menular. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air bersih dapat

mengurangi kejadian penyakit menular.

4. Menjalinkan Kerja Sama

Penanganan bencana dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk menjamin kerjasama yang baik, pada tahap sebelum bencana ini masyarakat perlu menjalin hubungan dengan pihak-pihak seperti puskesmas, polisi, aparat desa atau kecamatan.

2.1.5.2. Aspek Kesiapsiagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan mencakup faktor-faktor seperti rencana darurat bencana, sistem peringatan dini, pemenuhan kebutuhan dasar, mekanisme dan prosedur tanggap darurat, serta penyediaan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana.

Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006) mengidentifikasi lima parameter dasar kesiapsiagaan, yaitu pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana keadaan darurat bencana, sistem peringatan bencana, dan kemampuan mobilisasi sumber daya.

Sutton dan Tierney (2006) mengemukakan delapan faktor kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, antara lain: pengetahuan bahaya; manajemen, arah, dan koordinasi operasi darurat; formal dan perjanjian respon informal; sumber daya; perlindungan keselamatan jiwa; perlindungan hak milik; mengatasi darurat dan pemulihan; serta kemampuan sosialisasi masyarakat.

International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) menyebutkan tujuh faktor kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu pengetahuan terhadap bencana; kebijakan, peraturan, dan panduan; modal sosial; rencana keadaan darurat; sistem peringatan bencana; dan kemampuan mobilisasi sumber daya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2012, sebagaimana dikutip dalam Mildawati (2024), menguraikan kerangka kerja kesiapsiagaan yang lebih terperinci melalui sembilan tahapan yang diterapkan dalam pendidikan, pelatihan, dan praktik di tingkat masyarakat, komunitas, ataupun kelembagaan. Proses ini diawali dengan penilaian risiko (*risk assessment*) untuk mengidentifikasi potensi bahaya, yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan siaga (*contingency planning*) yang detail dan terukur. Berdasarkan perencanaan tersebut, dilakukan mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) yang diperlukan, disertai dengan program pendidikan dan pelatihan (*training and education*) untuk meningkatkan kapasitas semua pihak. Agar implementasi berjalan efektif, dibangun sistem koordinasi (*coordination*) antar pemangku kepentingan dan mekanisme respon (*response mechanism*) yang jelas. Seluruh sistem ini didukung oleh adanya teknologi peringatan dini (*early warning*) dan manajemen informasi (*information systems*) yang andal. Sebagai tahap evaluasi dan pematapan, keseluruhan rangkaian ini diuji melalui kegiatan gladi atau simulasi (*drilling/simulation*) secara berkala. Faktor-faktor dan indikator dalam berbagai kajian kesiapsiagaan tersebut menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

2.1.5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan

Citizen Corps (2006), menyatakan bahwa “kesiapsiagaan seseorang atau komunitas terhadap bencana dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang kompleks.” Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi dua ranah utama. Pertama adalah faktor eksternal, yang berasal dari luar individu, seperti adanya kebijakan yang mendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan kebencanaan secara terstruktur. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor internal yang melekat pada diri individu, yaitu tingkat pengetahuan mereka mengenai risiko dan cara penanggulangannya, sikap mental mereka dalam menghadapi ancaman, serta keahlian praktis yang mereka miliki untuk bertindak saat terjadi bencana.

Keempat faktor menurut *Citizen Corps* ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem kesiapsiagaan. Faktor eksternal seperti kebijakan, pendidikan, dan latihan berperan sebagai pondasi atau pendorong utama. Kebijakan yang jelas menyediakan kerangka kerja dan sumber daya, sementara pendidikan dan latihan menjadi media untuk mentransfer pengetahuan dan mengasah keahlian.

Namun, efektivitas dari faktor eksternal tersebut sangat bergantung pada faktor internal. Sikap menjadi elemen psikologis yang penting karena berfungsi sebagai jembatan antara mengetahui dan melakukan. Seseorang bisa saja memiliki pengetahuan yang luas dari pendidikan dan keahlian yang mumpuni dari latihan, tetapi jika ia memiliki sikap apatis, meremehkan risiko, atau fatalistis, maka pengetahuan dan keahlian tersebut tidak akan pernah terwujud menjadi tindakan nyata. Sebaliknya, sikap yang proaktif dan peduli akan mendorong seseorang untuk

aktif mencari pengetahuan dan melatih keahliannya, bahkan ketika fasilitas eksternal terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan yang efektif lahir dari sinergi antara intervensi struktural sebagai faktor eksternal yang memfasilitasi dan kemauan serta kapasitas individu sebagai faktor internal yang didasari oleh sikap yang tepat untuk meresponnya.

2.1.5.4. Stakeholders Kesiapsiagaan Bencana

Menurut Hidayati dkk (2006) terdapat tiga *stakeholder* utama yang berperan dalam kesiapsiagaan, yaitu:

1. Individu dan Rumah Tangga

Individu dan rumah tangga dikatakan sebagai ujung tombak, subjek dan objek dari kesiapsiagaan karena berpengaruh secara langsung terhadap risiko bencana.

2. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting terutama dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan bencana, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana publik untuk keadaan darurat.

3. Komunitas Sekolah

Komunitas sekolah memiliki potensi yang besar dalam penyebarluasan pengetahuan tentang bencana, sumber pengetahuan dan petunjuk praktis apa yang harus disiapkan sebelum terjadinya bencana dan apa yang harus dilakukan saat serta setelah terjadinya bencana. Komunitas sekolah, sebagai salah satu dari *stakeholder* utama memiliki peran yang besar dalam penyebaran pengetahuan

tentang kebencanaan sejak sebelum, saat, hingga setelah terjadinya bencana (Hidayati dkk., 2006).

Sekolah memiliki peran untuk memberikan pengetahuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap bencana melalui Pendidikan pengurangan risiko bencana pada komunitas sekolah (Astuti dan Sudaryono, 2010).

2.1. Kampung Siaga Bencana

Sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan peraturan resmi mengenai pembentukan dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB). Peraturan ini memberikan definisi serta menjelaskan maksud dan tujuan dari program KSB secara jelas. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Kampung Siaga Bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. KSB dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Sebagai suatu model penanggulangan bencana berbasis masyarakat, prinsip utama pelaksanaan KSB adalah mengutamakan kemandirian masyarakat. Namun demikian, dukungan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana seperti pemerintah dan pihak swasta masih tetap dibutuhkan.

2.2.1. Tujuan Kampung Siaga Bencana

Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) memiliki serangkaian tujuan strategis yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 menjelaskan tujuan utama KSB adalah untuk secara mandiri dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Selanjutnya, KSB berupaya membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat sekaligus memperkuat interaksi sosial antarwarga, yang menjadi tokoh untuk mengorganisasikan masyarakat agar menjadi kelompok yang terlatih dan siaga bencana. Melalui pengorganisasian ini, KSB bertujuan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya lokal yang ada untuk keperluan penanggulangan bencana. Pada akhirnya, semua upaya ini diarahkan untuk menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.

2.2.2. Sasaran Kampung Siaga Bencana

Sasaran utama dari program Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan dan risiko tinggi terhadap bencana. Kawasan ini merupakan wilayah yang secara geografis rentan mengalami berbagai jenis ancaman, baik bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, maupun bencana non-alam. Tingkat risiko ini tidak hanya ditentukan oleh adanya ancaman, tetapi juga diperkuat oleh faktor kerentanan sosial, ekonomi, dan fisik, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan akses infrastruktur, serta minimnya pengetahuan awal mengenai mitigasi bencana (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011).

2.2.3. Prinsip Kampung Siaga Bencana

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB) Tahun 2011, pelaksanaan KSB memiliki beberapa prinsip diantaranya:

1. Kesukarelaan

Tim KSB dalam menjalankan programnya bersifat sukarela, bertujuan semata untuk kemanusiaan dan tidak berafiliasi dengan kegiatan politik tertentu.

2. Kerja sama

Kegiatan yang ada dalam KSB baik bersifat kedalam dan keluar yang dilaksanakan sebelum, pada saat dan pasca bencana mengedepankan kerja sama dan keterpaduan.

3. Akuntabilitas

Kegiatan KSB baik sebelum, pada saat dan sesudah bencana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4. Partisipasi

Kegiatan KSB melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada pada daerah tersebut.

5. Menghargai dan Menghormati Nilai-Nilai Lokal

Kegiatan penanggulangan bencana menghargai nilai-nilai setempat yang telah berlaku dalam menanggulangi masalah kebencanaan.

6. Kemandirian

Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat. Tim KSB mengedepankan kemandirian masyarakat.

2.2.4. Kegiatan Kampung Siaga Bencana

Kegiatan KSB menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan menjadi pokok dalam kegiatan KSB. Tim KSB penting untuk dapat mempersiapkan kegiatan baik sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara tahap satu dengan tahap lainnya.

1. Pra Bencana

Kegiatan pra bencana berfokus pada pengenalan potensi dan sumberdaya yang ada pada masyarakat, ancaman dan risiko bencana yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa bencana serta mempersiapkan masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana (kesiapsiagaan). Kesiapsiagaan masyarakat sebelum terjadinya bencana sangat penting dilakukan mengingat bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Kegiatan sebelum bencana yang dapat di rencanakan oleh KSB meliputi:

- 1) Memperkirakan risiko bencana dengan pembuatan profil desa, penilaian ancaman, penilaian kerentanan dan kemampuan, serta penilaian risiko.
- 2) Mempersiapkan pembagian tugas atau seksi pada tim KSB seperti tim peringatan dini, tim evakuasi, tim komunikasi, tim pengungsian, tim dapur umum dan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperlancar dan mempertegas tugas dan tanggung jawab. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan dan dengan siapa harus bekerjasama.

- 3) Menyusun dan melaksanakan kegiatan gladi atau simulasi penanggulangan bencana
- 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan seluruh unsur perwakilan masyarakat. SOP berlaku dalam jangka waktu tertentu karena alasan perkembangan sosial, budaya, politik dan lingkungan. SOP dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada pada KSB.

2. Pada Saat Bencana

Pada saat terjadi bencana, Tindakan tim KSB berfokus pada pemberian pertolongan langsung pada korban bencana dan mempraktekan apa yang sudah disusun pada tahapan sebelum bencana. Ketua tim KSB berperan untuk memutuskan apakah warga desa harus mengungsi atau tidak. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat terjadinya bencana oleh tim KSB diantaranya adalah:

- 1) Mempersiapkan tugas setiap seksi dalam tim KSB, pembagian seksi dapat diperluas dengan mempertimbangkan situasi dan kompleksitas masalah yang ada di lapangan.
- 2) Membantu menangani korban bencana seperti mempersiapkan atau mendirikan tenda, dapur umum lapangan, pos komunikasi terpadu, dan lainnya.
- 3) Membuat laporan kondisi bencana dan korban bencana kepada pemerintah daerah setempat (Dinas Sosial/BPBD).

3. Pasca Bencana

Peran KSB pada fase pascabencana, yaitu meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan erat dengan kegiatan pemulihan. Selama masa ini, KSB diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan dari dalam komunitas. Pengurus dan anggota KSB secara rutin mengadakan musyawarah atau pertemuan dengan warga untuk melakukan pendataan dan pemetaan yang akurat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan jangka panjang, mulai dari pemulihan psikologis, perbaikan hunian sementara, pemulihan sarana umum, hingga membangkitkan kembali sumber mata pencaharian warga yang terdampak (Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana, 2011).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, KSB berfungsi sebagai jembatan penghubung yang tepercaya antara korban bencana dengan pihak eksternal. KSB dapat secara proaktif mengajukan dan mengoordinasikan bantuan dari pemerintah, masyarakat peduli bencana, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan. Lebih dari itu, KSB juga berperan penting dalam memastikan distribusi bantuan tersebut tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pada tahap rekonstruksi, KSB dapat mengadvokasikan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kembali, dan memastikan prosesnya partisipatif.

2.2.5. Pembentukan Kampung Siaga Bencana

Kampung Siaga Bencana (KSB) dibentuk dan dilaksanakan di seluruh Indonesia sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2011, mekanisme pembentukan KSB dibagi ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu pra pembentukan, pembentukan, dan pasca pembentukan.

1. Syarat Kampung Siaga Bencana

Lokasi yang akan dijadikan KSB harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Memiliki kerawanan, kerentanan dan berisiko terhadap jenis bencana tertentu.
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam bentuk penetapan pembentukan.
- 3) Adanya kesiapan dan peran serta aktif masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana untuk membentuk KSB.
- 4) Adanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2. Tahapan Pembentukan

1) Pra pembentukan

Kegiatan pra pembentukan merupakan kegiatan penyebaran informasi pada tingkat pembuat kebijakan dan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan bencana seperti BPBD, BMKG, PMI dan instansi atau pihak lainnya. Dalam pra pembentukan terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan seperti:

- (1) Sosialisasi informasi yang menggambarkan pentingnya penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.
- (2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi tentang potensi dan sumber daya ada pada wilayah tersebut untuk penanggulangan bencana.
- (3) Mengenali berbagai ancaman yang menimbulkan bencana.
- (4) Koordinasi persiapan penetapan lokasi. Dalam hal ini telah diperoleh kesepakatan mengenai lokasi gardu sosial dan lumbung sosial.

2) Pelaksanaan Pembentukan

- (1) Penyuluhan atau penyebaran informasi pada 100-150 orang masyarakat yang peduli terhadap masalah kebencanaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan tim KSB yang berjumlah 30-50 orang dengan indikator kompak dan solid.
- (2) Pelatihan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan penanggulangan bencana di daerah masing-masing. Materi yang diberikan bersifat konseptual dan praktikal yang mencakup kebencanaan secara umum, masalah kebijakan dan peraturan penanggulangan berbasis masyarakat, Kampung Siaga Bencana, cara mengenali ancaman dan risiko bencana, dan lain-lain.
- (3) Kegiatan simulasi yang melibatkan masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan minimal berjumlah 100 orang di lapangan terbuka. Tujuannya adalah mempraktekan/memperagakan pengetahuan bencana sekaligus

bagaimana tindakan saat terjadi bencana. Simulasi penanggulangan bencana difasilitasi oleh TAGANA.

3) Pasca Pembentukan

Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemantauan secara berkala. Aspek-aspek yang dipantau dalam KSB seperti:

- 1) Gardu sosial dan kelengkapannya (direktori).
- 2) Lumbung sosial penanggulangan bencana dan isinya.
- 3) Kegiatan KSB lain yang mendukung penanggulangan bencana.

2.2. Pekerjaan Sosial dengan Kebencanaan

Dalam menganalisis dampak bencana, Alston et al. (2019) mengklasifikasikan tingkatan praktik dalam masyarakat untuk menganalisis dampak bencana. Mereka mengidentifikasi tiga tingkatan: makro, meso, dan mikro. Pada tingkat makro, mereka mendefinisikan kapasitas partisipasi komunitas sebagai kemampuan bersama dalam menghadapi dan mengatasi dampak bencana. Pada tingkat meso, mereka menyoroti interaksi timbal balik antar anggota komunitas yang memperkuat solidaritas dan dukungan sosial. Pada tingkat mikro, mereka menekankan peran individu dalam proses pemulihan dan adaptasi.

Alston (2019) berpendapat bahwa bencana, sebagai peristiwa besar, berdampak pada seluruh aspek komunitas. Bencana merusak infrastruktur dan melemahkan institusi-institusi yang ada pada tingkat makro. Selanjutnya, bencana memperburuk kondisi kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan bantuan ekstra pada tingkat meso. Selain itu, bencana menurunkan standar hidup individu-individu yang terdampak pada tingkat mikro.

Meskipun bukti kuat menunjukkan dampak bencana pada individu, pekerja sosial perlu memperhatikan dan menangani dampak bencana pada semua tingkatan praktik. Mereka harus memahami dan merespon dampak bencana secara komprehensif. Dengan demikian, pekerja sosial dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas.

1. Tingkat Makro

Hazeleger, Alston, dan Hargreaves (2018) menjelaskan bahwa praktik pekerjaan sosial pada tingkat makro berfokus pada perubahan luas dalam masyarakat. Perubahan ini mencakup kebijakan, manajemen, pendidikan, dan penelitian. Pada tingkat makro, pekerja sosial perlu memahami faktor-faktor seperti kolaborasi transnasional dan nasional, kebijakan, praktik, dan ideologi yang membentuk respon terhadap bencana dan dampaknya. Mereka harus siap tidak hanya mengadvokasi perubahan, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan bencana melalui advokasi dan keterlibatan.

Pekerja Sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pulih dan membangun kembali komunitas mereka setelah bencana. Respon kelembagaan terhadap bencana sangat penting dalam menentukan kemampuan adaptasi masyarakat. Pekerjaan sosial berkontribusi pada penguatan masyarakat, pembangunan kembali yang lebih baik (UNISDR, 2017), serta mendorong kesetaraan, pemulihan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

Di tingkat makro, tindakan pekerjaan sosial difokuskan pada kebijakan, advokasi, manajemen, penelitian, pendidikan, dan tindakan di tingkat nasional.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan perencanaan dan praktik pekerjaan sosial dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, pekerjaan sosial tidak hanya membantu masyarakat mengatasi dampak langsung bencana, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

2. Tingkat Meso

Tingkat meso dalam pekerjaan sosial memfokuskan pada interaksi antara individu dengan kelompok dan komunitas yang lebih luas. Interaksi ini mencakup hubungan antara individu dengan berbagai institusi, seperti pemerintah, keluarga, lingkungan, dan kelompok sosial lainnya (Hazeleger, Alston, & Hargreaves, 2018; Faist, 2010).

Intervensi pekerjaan sosial pada tingkat meso bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan dan mencapai keberlanjutan komunitas. Intervensi ini berfokus pada penguatan ikatan sosial, peningkatan kapasitas swadaya masyarakat, pengembangan infrastruktur layanan, dan bantuan bagi kelompok rentan. Dalam konteks bencana dan kebijakan yang mempengaruhi respon masyarakat, intervensi ini memainkan peran penting dalam memperkuat komunitas dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Tingkat Mikro

Hazeleger, Alston, dan Hargreaves (2018) menjelaskan bahwa pada tingkat mikro, fokus utama adalah interaksi antar individu. Interaksi ini melibatkan praktik pekerjaan sosial, komunikasi interpersonal, negosiasi, dan advokasi. Intervensi pada tingkat ini bertujuan mengatasi dampak yang dialami individu dan memenuhi

kebutuhan mendesak mereka, seperti keamanan, tempat tinggal, makanan, dan air. Tindakan pekerjaan sosial berupaya meningkatkan kemampuan adaptasi individu dan membantu memperbaiki standar hidup penyintas.

2.3.1. Peran Pekerja Sosial Kebencanaan

Alston (2019) mengidentifikasi faktor-faktor jangka panjang yang penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana. Faktor-faktor tersebut meliputi penguatan struktur pemerintahan lokal, peningkatan layanan masyarakat dalam pengembangan kapasitas, dan pemantapan modal sosial di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, pekerja sosial memiliki peran strategis dalam membangun komunitas yang kuat dan tangguh, serta individu-individu yang siap menghadapi dan mengatasi potensi bencana. Peran-peran pekerja sosial dalam kebencanaan diantaranya adalah:

1. Tingkat Makro

Pada tahap pra bencana, fokus utama pekerja sosial adalah pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan proaktif seperti mengadvokasi kebijakan yang berfokus pada hak asasi manusia serta keadilan lingkungan. Pekerja sosial juga memberikan saran dalam pengembangan kebijakan, membangun modal sosial dan kapasitas masyarakat, melakukan pelatihan kesiapsiagaan, serta membuat daftar kerentanan. Upaya ini diperkuat dengan membantu memperkuat struktur tata kelola lokal, mengadvokasi sistem peringatan dini, dan memastikan panduan manajemen darurat dikembangkan secara inklusif. Selain itu, kegiatan penelitian berbasis komunitas dan pengintegrasian

teori eko-sosial ke dalam kurikulum pendidikan merupakan bagian fundamental dari upaya membangun ketahanan jangka panjang sebelum bencana terjadi.

Ketika saat bencana terjadi, peran makro pekerja sosial lebih berfokus pada pemantauan dan advokasi strategis di tingkat sistem. Meskipun tindakan langsung lebih banyak terjadi di tingkat mikro dan meso, di tingkat makro pekerja sosial bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan dan sistem yang telah dibangun seperti panduan manajemen darurat yang inklusif dan sistem peringatan dini diterapkan secara adil dan efektif. Pekerja sosial menyuarakan kebutuhan kelompok rentan yang mungkin terabaikan dalam respon darurat dan memastikan informasi yang disebarakan tidak diskriminatif.

Pada tahap pasca bencana, peran pekerja sosial makro bergeser ke arah pemulihan dan evaluasi. Pekerja sosial melakukan penelitian untuk menyuarakan pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak, memastikan suara mereka didengar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pekerja sosial juga secara kritis mengevaluasi program atau kebijakan yang ada, serta memberikan umpan balik mengenai kesenjangan layanan yang muncul selama bencana. Hasil dari evaluasi dan penelitian ini kemudian digunakan untuk mengadvokasi perbaikan kebijakan dan program kesiapsiagaan di masa depan, sehingga menciptakan siklus pembelajaran dan peningkatan ketahanan yang berkelanjutan.

2. Tingkat Meso

Pada tahap pra bencana, pekerja sosial secara aktif terlibat dalam penguatan kapasitas komunitas. Pekerja sosial bekerja langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan kelompok

minoritas, untuk menyusun rencana kesiapsiagaan yang sesuai dengan kekuatan dan kondisi lokal mereka. Peran ini juga mencakup pembentukan atau dukungan terhadap kelompok kesiapsiagaan bencana, menumbuhkan modal sosial, memfasilitasi program pendidikan dan pelatihan praktis seperti pertolongan pertama kesehatan mental, serta membangun daftar kerentanan bersama pemerintah daerah. Di sisi lain, pekerja sosial melakukan analisis dan advokasi di tingkat lokal dengan menilai kebijakan yang ada dan memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan mengenai kesenjangan layanan.

Ketika saat bencana tiba, peran meso pekerja sosial adalah menjadi fasilitator dan koordinator. Kelompok dan rencana yang telah dibentuk sebelumnya diaktifkan, dan pekerja sosial membantu memastikan kelompok-kelompok ini dapat berfungsi, memfasilitasi komunikasi antara komunitas dengan lembaga tanggap darurat eksternal, serta terus mengawal agar kebutuhan spesifik kelompok rentan tidak terabaikan di tengah situasi darurat. Selanjutnya, pada fase pasca bencana, fokusnya adalah pada pemulihan. Pekerja sosial memfasilitasi forum komunitas untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan mengumpulkan umpan balik mengenai efektivitas respon. Umpan balik ini menjadi bahan advokasi penting kepada pembuat kebijakan untuk perbaikan di masa depan, sementara kelompok masyarakat yang sudah kuat menjadi motor utama dalam proses pemulihan sosial di tingkat lingkungan.

3. Tingkat Mikro

Pada tahap pra bencana, pekerja sosial secara langsung membantu individu dan keluarga dalam menyusun rencana kesiapsiagaan bencana. Ini mencakup

perancangan strategi evakuasi, persiapan tas siaga, dan mempertimbangkan kondisi spesifik lingkungan fisik serta sosial mereka. Bagian krusial dari tahap ini adalah membantu mereka yang memiliki kerentanan khusus seperti lansia atau penyandang disabilitas untuk terdaftar dalam basis data kerentanan resmi agar mendapatkan prioritas saat bantuan disalurkan.

Ketika saat bencana terjadi, peran pekerja sosial menjadi sangat aktif dan langsung. Pekerja sosial memberikan dukungan psikologis awal (*psychological first aid*), membantu menenangkan individu dan keluarga yang panik, serta memastikan rencana darurat yang telah disusun dapat dijalankan. Pekerja sosial secara proaktif menghubungi klien yang terdaftar dalam daftar kerentanan untuk memastikan keselamatan mereka dan membantu mereka mengakses tempat perlindungan atau layanan darurat lainnya.

Pada tahap pasca bencana, peran mereka beralih ke manajemen kasus dan dukungan pemulihan jangka panjang. Ini meliputi pendampingan untuk mengakses bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, layanan konseling untuk mengatasi trauma, serta advokasi individual agar hak-hak mereka terpenuhi. Selain itu, pekerja sosial akan meninjau kembali rencana kesiapsiagaan bersama keluarga untuk mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga meningkatkan ketahanan mereka untuk menghadapi potensi bencana di masa depan.

2.3. *Community Development*

Community development merupakan sebuah konsep yang semakin relevan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam era globalisasi dan

perubahan sosial yang dinamis, pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat menjadi semakin penting. Pembangunan masyarakat tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan mereka sendiri.

2.4.1. Definisi *Community Development*

Community development atau pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka (FCDL, 2003 dalam Zubaedi, 2013).

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas: kaum buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para

nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, disabilitas dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras dan etnis.

Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. Pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995).

Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut Twelvetrees (1991), pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”* Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan (Edi Suharto, 2003).

Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan

partisipatisi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkokoh interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, soliditas di antara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindak-lanjuti dengan aksi sosial nyata.

Merujuk pendapat Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang diorientasikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu (Darkenwald, Gordon, G, dan Merriam, Sharan, B,1982).

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan pengembangan masyarakat bisa dijelaskan menurut dua pendekatan yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Dengan pendekatan profesional, pengembangan masyarakat menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial (Edi Suharto, 2003).

Mayo (1998), mengklasifikasikan pengembangan masyarakat ke dalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal. Keenam model tersebut meliputi: perawatan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, pengembangan masyarakat pada gugus profesional; aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan kelas sosial, aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan gender dan aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan ras (warna kulit) pada gugus radikal.

1. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan *volunter* yang biasanya dilakukan secara sukarela oleh warga kelas menengah. Tujuan adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan masyarakat secara resmi.
2. Pengorganisasian masyarakat merupakan kegiatan yang difokuskan pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pengembangan masyarakat merupakan upaya atau kegiatan yang menaruh perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan kelas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
5. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan gender merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara serta antara orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi sosial kemasyarakatan berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan persamaan kesempatan di antara berbagai ras dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Sementara itu, menurut pendekatan radikal yang berpijak pada teori struktural Neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis. Kegiatan pengembangan masyarakat lebih difokuskan pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari

sebab-sebab kelemahan mereka serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Pengembangan masyarakat difokuskan untuk membantu masyarakat lapis bawah dalam mengendalikan secara mandiri terhadap kehidupannya. Proses ini menuntut intervensi terhadap proses dan struktur yang memfasilitasi akses dan kendali terhadap sumber daya dan mengembangkan cara-cara berpikir dan mengerjakan sesuatu yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat miskin dan tidak beruntung. Berbagai kegiatan pengembangan masyarakat harus selalu bisa diakses oleh setiap anggota masyarakat. Para aktivis pengembangan masyarakat harus mengidentifikasi kebutuhan dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Hal ini berarti mereka menghabiskan waktunya di luar kantornya. Mereka senantiasa berbicara dan menyatu bersama masyarakat di daerahnya.

Peran pekerja pengembangan masyarakat adalah membantu masyarakat dalam mengidentifikasi isu, masalah dan kebutuhan sebagaimana apa yang lihat sendiri menurut referensi ilmiah serta memfasilitasi munculnya upaya pemecahan secara bersama-sama terhadap isu, masalah dan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pekerja pengembangan masyarakat bekerja bersama dan untuk masyarakat. Mereka tidak bekerja sebagai patron atau orang luar, namun dibangun di atas dasar prinsip saling beremansipasi. Para pekerja pengembangan masyarakat adalah subyek dalam sitem politik dan ekonomi yang mendorong dan merangsang masyarakat agar mau bekerja sama dengan mereka. Hal ini bisa diungkapkan melalui sebuah ungkapan sebagai berikut: “Jika kamu membantu saya, kamu menjadi bagian dari masalah”. “Jika kamu di sini sebab kamu memahami bahwa

keikutsertaan kamu bisa melepaskan ikatan denganku maka kita bisa sukses meraihnya”.

Secara rinci, para aktivis pengembangan masyarakat menangani serangkaian pekerjaan yang mencakup:

1. Penelitian dan penelaahan isu-isu, kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan di masyarakat.
2. Persiapan kebijakan dan rumusan berdasarkan isu.
3. Pengembangan dan pemeliharaan sumber-sumber daya.
4. Pengembangan cara-cara untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dari luar dan proses pengambilan kebijakan.
5. Pengembangan, pemeliharaan dan penilaian program-program masyarakat.
6. Perencanaan strategis.
7. Pengembangan, penafsiran dan pelaksanaan kebijakan masyarakat.
8. Pengembangan dan pemeliharaan demokrasi dan partisipasi proses pengambilan keputusan dalam masyarakat.
9. Perwakilan, pembelaan, perundingan dan penengahan dalam dan antara masyarakat, agen, lembaga dan pemerintah.
10. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
11. Pendekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, para pekerja dan profesional lain, agen dan pemerintah.
12. Pengembangan dan pengalihan keterampilan dan pengetahuan dalam organisasi masyarakat, advokasi, pengembangan sumber daya, kesadaran budaya dan wilayah-wilayah lain dalam masyarakat.

13. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak asasi dan tanggung jawab mereka.
14. Persiapan dan penyebarluasan tulisan dan materi pemberitaan dan pengembangan media kontak.
15. Penanganan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pemeliharaan proyek masyarakat seperti *lobby*, persiapan rancangan anggaran, laporan dan dokumentasi keuangan.
16. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat dalam berhubungan dengan profesional lain, lembaga, agen masyarakat, pemerintah dan badan-badan lain.
17. Pengembangan kampanye masyarakat.

Peranan seorang pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat kebanyakan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai *problem solver* (pihak yang memecahkan masalah). Kegiatan pendampingan sosial ini berpusat pada tiga visi praktek pekerjaan sosial, yang dapat diringkas sebagai 3P, yaitu: pemungkin (*enabling*) pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*).

Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program LSM sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) maupun dinamisator (penggerak) (Moeljarto, Vidhyandika, 1996).

Model pendampingan dalam kegiatan pengembangan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan proses pemberdayaan masyarakat. Pertama pendamping itu

sendiri yang terdiri atas para pekerja sosial dan yang kedua adalah kelompok yang didampingi atau yang akan diberdayakan. Hubungan antara pendampingan dan pemberdayaan bersifat setara, timbal balik dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan akhir dari pendampingan adalah terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan yang dihadapinya secara mandiri dan berkesinambungan.

2.4.2. Peningkatan Kapasitas

Kapasitas (*capacity*) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan. Kemampuan berasal dari kata mampu yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan yang kemudian bisa menghasilkan barang atau jasa yang diharapkan. Kemampuan juga dapat ditujukan kepada keadaan atau sifat seseorang yang mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada atau terorganisasi. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan dengan kemampuan sumber daya manusianya (Haryanto; 2014).

Menurut Milen (2006), kapasitas ialah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap dan nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan setiap orang, organisasi, jaringan kerja atau sektor, serta sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kapasitas dapat dipilhkan kedalam beberapa kategori seperti: kemampuan manusia (*human capability*), kemampuan sosial (*social capability*), dan kemampuan politik (*political capability*). Kapabilitas tersebut bisa melekat pada diri individu, kelompok atau organisasi, komunitas dan masyarakat luas (*society*) (Ayu & Syawie; 2015).

Pengertian lainnya menurut Gandara (2008), bahwa “Peningkatan kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.” Selain itu menurut Keban (2000) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responifitas dari kinerja. Pengertian peningkatan kapasitas lainnya menurut Soeprapto (2003) yaitu:

1. Peningkatan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.
2. Peningkatan kapasitas adalah proses pembelajaran multi tingkatan meliputi individu, kelompok, organisasi, dan sistem.
3. Peningkatan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.
4. Peningkatan kapasitas dapat disebut sebagai *actionable learning*, dimana peningkatan kapasitas meliputi sejumlah proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

Soeprapto (2006), faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama

Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan.

2. Kepemimpinan

Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program peningkatan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta.

3. Reformasi peraturan

Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program peningkatan kapasitas.

4. Reformasi kelembagaan

Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim personal dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural.

2.5. Pertukaran Sosial

Menurut Wiggins (1996), pertukaran sosial merupakan tindakan dengan mempertimbangkan untung-rugi baik material maupun non material. Proses pertukaran sosial sudah dibicarakan oleh sejumlah ahli teori sosial klasik. Dalam teori ekonomi klasik abad ke-18 dan ke-19 para ekonom politik Inggris seperti

Adam Smith sudah menganalisa pasar ekonomi sebagai hasil dari kumpulan (agregasi) yang menyeluruh dari sejumlah transaksi individual yang tidak terbilang besarnya. Pertukaran diasumsikan bahwa transaksi pertukaran akan terjadi hanya apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu dan bahwa kesejahteraan masyarakat umumnya dijamin baik apabila individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya melalui pertukaran yang diperuntukkan secara pribadi (Johnson, 1990).

Teori pertukaran sosial berlandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer dimana orang menyediakan barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran memiliki asumsi yang sederhana bahwa interaksi sosial mirip dengan transaksi ekonomi. Tapi diakui bahwa teori pertukaran sosial tidak selalu diukur dengan nilai uang sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan hal yang nyata dan tidak nyata. Asumsi dasar untuk menganalisa dari teori perilaku sosial yaitu :

1. Manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum tetapi mereka senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan orang lain
2. Manusia tidak bertindak secara rasional sepenuhnya tetapi dalam setiap interaksinya dengan orang lain cenderung berpikir untung dan rugi.
3. Sekalipun tidak mempunyai informasi semua hal untuk mengembangkan alternatif, manusia setidaknya mempunyai informasi dapat dipakai untuk mengembangkan alternatif menghitung untung-rugi yang mungkin timbul.
4. Manusia senantiasa berada dalam keterbatasan namun tetap untuk berkompetisi mendapatkan keuntungan dari dalam transaksi dengan orang lain.

5. Manusia selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari hasil interaksinya dengan orang lain tetapi dibatasi dengan sumberdaya yang tersedianya.
6. Manusia selalu berusaha mendapatkan hasil dalam wujud material namun melibatkan dan menghasilkan sesuatu yang bersifat immaterial misalnya perasaan suka dan sentimen (Zamroni, 1992)

Teori pertukaran menginginkan tujuan berupa ganjaran ekstrinsik misalnya barang, uang atau jasa dan ganjaran intrinsik misalnya kasih sayang, kehormatan, kecantikan. Perilaku manusia yang dibimbing oleh prinsip pertukaran sosial itu mendasari pembentukan struktur serta lembaga-lembaga sosial (Rakhmat, 2002).

Thibault dan Kelley (1959), menyimpulkan model pertukaran sosial sebagai: bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari:

1. Ganjaran (*rewards*) ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya dan nilainya berbeda-beda. Bagi orang kaya, mungkin penerimaan sosial (*social approval*) lebih berharga daripada uang. Bagi si miskin, hubungan interpersonal yang dapat mengatasi kesulitan ekonominya lebih memberikan ganjaran daripada hubungan yang menambah pengetahuan.
2. Biaya (*cost*) adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, harga diri dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu

atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.

3. Hasil atau laba (*outcomes*) adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seseorang merasa, dalam suatu hubungan interpersonal, bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Misalnya, anda mempunyai kawan yang pelit dan bodoh. Anda banyak membantunya, tetapi hanya sekedar upaya persahabatan dengan dia tidak putus. Bantuan Anda (biaya) ternyata lebih besar daripada nilai pertukaran sosial, hubungan Anda dengan sahabat pelit itu mudah sekali retak dan digantikan dengan hubungan baru dengan orang lain.
4. Tingkat perbandingan (*comparisons level*) menunjukkan ukuran baku (standar) yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu, seorang individu mengalami suatu hubungan interpersonal yang memuaskan pada tingkat perbandingannya turun. Bila seorang gadis pernah berhubungan dengan kawan pria dalam hubungan yang bahagia, ia akan mengukur ganjaran hubungan interpersonal dengan kawan pria lain berdasarkan pengalamannya dengan kawan pria terdahulu. Makin bahagia ia pada hubungan interpersonal sebelumnya, makin tinggi tingkat perbandingannya.

Pada tingkat perbandingan (*comparisons level*) menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu

alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu seorang individu mengalami hubungan interpersonal yang memuaskan maka tingkat perbandingannya turun (Rakhmat, 2005).

Teori pertukaran sosial memberikan landasan penting dalam memahami dinamika yang terjadi dalam proses perencanaan partisipatif. Interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh harapan akan adanya keuntungan bersama baik dalam bentuk material seperti akses sumber daya, maupun non material seperti pengakuan sosial, solidaritas, dan rasa memiliki.

Konsep dasar dari pertukaran sosial adalah bahwa individu atau kelompok akan bersedia terlibat dalam suatu proses termasuk perencanaan apabila mereka merasakan adanya laba sosial, yaitu keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip partisipasi, di mana keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi didasarkan pada kesadaran akan manfaat langsung dan tidak langsung dari partisipasi tersebut.

2.5.1. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan Partisipatif adalah bidang dinamis yang menekankan keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai lingkungan dan mata pencaharian mereka (Noor & Nurhayati, 2024). Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan

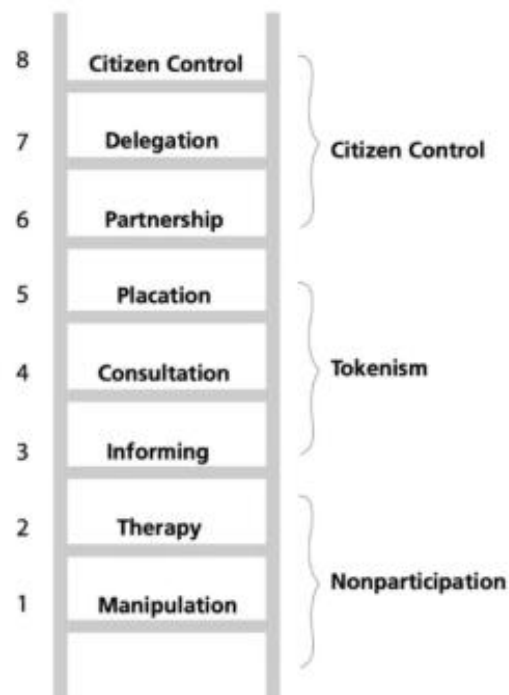
mempunyai unsur-unsur: (1) Berhubungan dengan masa depan, (2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. (Kunarjo, 2002).

Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dalam hal tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Erly Suandy (2001), “Pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.”

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua *stakeholders* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan, (Abady, 2013).

Perencanaan partisipatif menurut Abe (2002) adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Abe juga menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk perencanaan partisipatif yaitu: pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, berupa perencanaan lokasi setempat (menyangkut daerah di mana masyarakat berada) dan berupa perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan; kedua, perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan sesuai institusi yang sah (seperti parlemen).

Perencanaan partisipatif erat berkaitan dengan tingkatan partisipasi, Arnstein (1969) menjelaskan bahwa, “partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan masyarakat dalam menentukan rencana dan program.” Oleh karena itu Arnstein membuat model tangga partisipasi publik dan secara umum terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat yaitu tidak partisipatif (*non-participation*) terdiri dari *manipulation* dan *therapy*, derajat semu (*degrees of tokenism*) terdiri dari *information*, *consultation*, dan *placation*, serta kekuatan masyarakat (*degrees of citizen powers*) terdiri dari *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.



Gambar 2.1 *Degrees of Citizen Participation*
Sumber: Arnstein's Ladder (1969)

Berikut ini penjelasan makna dari setiap level partisipasi:

1. *Manipulation*

Di level ini masyarakat tidak dilibatkan dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut.

2. *Therapy*

Pada level ini masyarakat mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut

3. *Informing*

Pada level *informing* otoritas berkuasa tidak menghalangi partisipasi tetapi tidak mengeksekusi aspirasi masyarakat. Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah dilaksanakan.

4. *Consultation*

Pada level ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik masyarakat akan digunakan.

5. *Placation*

Selanjutnya pada level *placation*, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan aspirasi masyarakat tetapi diam-diam menjalankan rencana semula.

6. Partnership

Pada level partnership telah mencapai *citizen power*, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program.

7. Delegation

Naik ke level *delegation* dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan. Sehingga peran masyarakat untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

8. Citizen Control

Dan untuk level tertinggi yaitu *Citizen Control*, dimana masyarakat yang lebih mendominasi dan peran masyarakat hingga mengevaluasi kinerja mereka. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi masyarakat ideal.

2.5.2. *Technology of Participation (ToP)*

Technology of Participation (ToP) atau teknologi partisipasi adalah suatu metode fasilitasi untuk membantu kelompok dalam pembuatan keputusan secara partisipatif. Dalam melakukan fasilitasi pada kelompok, teknologi partisipasi mengeksplorasi munculnya inisiatif-inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan dan tanggung-jawab dari seluruh anggota kelompok. Sekali lagi ditekankan dari seluruh anggota kelompok (Agustang, 2006).

Terdapat tiga metode dasar dalam teknologi Partisipasi, yaitu metode diskusi, metode *workshop* dan metode perencanaan tindakan (*action plan*). Menurut

Agustang (2006), ketiga metode ini membantu masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.:

1. Metode Diskusi

Metode Diskusi merupakan sebuah pendekatan yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pemahaman dalam sebuah kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi sarana bagi para partisipan untuk saling berbagi pengalaman serta berbagai perspektif mengenai suatu topik dalam suasana yang konstruktif dan tidak rawan konfrontasi. Melalui proses ini, diharapkan wawasan setiap partisipan atas suatu masalah dapat menjadi lebih dalam dan komprehensif. Selain untuk memperkaya pengetahuan, metode ini juga memiliki fungsi praktis, di mana dapat digunakan untuk meninjau kembali kesepakatan bersama yang mungkin sebelumnya telah dibuat namun dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini, sehingga membuka ruang untuk perbaikan atau pembaruan.

2. Metode *Workshop*

Metode *workshop* adalah pendekatan terstruktur yang dirancang untuk lebih berfokus pada pengambilan keputusan dan perumusan tindakan konkret. Berbeda dengan diskusi yang sifatnya lebih eksploratif, tujuan utama dari sebuah *workshop* adalah untuk secara aktif membangun kesepakatan kelompok mengenai suatu isu atau masalah. Melalui serangkaian sesi kerja yang terarah, metode ini bertujuan untuk menghasilkan output yang jelas dan praktis, seperti sebuah rencana tindakan (*action plan*) yang siap diimplementasikan atau

setidaknya sebuah kesepakatan bersama mengenai akar masalah secara menyeluruh.

3. Metode *Action Plan*

Metode rencana aksi (*action plan*) merupakan sebuah tahap lanjutan yang spesifik dan terfokus, yang hanya dapat dilakukan jika telah ada kesepakatan bersama sebelumnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menerjemahkan kesepakatan umum tersebut menjadi sebuah rencana tindakan yang konkrit dan sangat rinci. Lebih dari sekadar daftar tugas, sebuah rencana aksi yang baik juga harus secara eksplisit mengandung mekanisme untuk akuntabilitas, seperti menentukan siapa penanggung jawab untuk setiap kegiatan. Secara keseluruhan, metode ini menghasilkan sebuah sistem manajemen untuk tindakan yang akan dilakukan, lengkap dengan alur kerja, linimasa, dan cara pemantauan, sehingga memastikan setiap rencana dapat dieksekusi secara efektif dan terukur.

2.5.2.1. Metode Diskusi dengan Pendekatan ORID

Diskusi dalam teknologi partisipasi atau lebih dikenal sebagai *Technology of Participation* (ToP) dilakukan dengan menggunakan pendekatan ORID (*Objective-Reflectif-Interpretative-Decisional*). Sesuai dengan namanya pendekatan tersebut akan menggulirkan diskusi dalam proses mengalir dari pembahasan pada tahap *objective* hingga tahap *decisional*. Agustang (2006) menjelaskan bahwa:

Metode diskusi ORID digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam suatu kelompok. Metode diskusi ORID memungkinkan setiap anggota kelompok memberikan kontribusinya (ide, masalah, usulan, dan sebagainya), terjadinya proses diskusi yang terfokus dan berarti, hadirnya

berbagai perspektif mengenai suatu topik dalam dialog yang tidak konfrontatif, terjadinya kedalaman pemahaman secara bersama-sama dalam kelompok, dihasilkannya solusi dan rencana aksi yang spesifik, realitas dan masuk akal.

Penjelasan berikut menegaskan bahwa metode ORID tidak hanya mendorong partisipasi individu, tetapi juga menciptakan suasana diskusi yang kondusif, inklusif, dan produktif. Dengan struktur yang jelas, ORID membantu peserta memahami permasalahan secara bertahap mulai dari fakta objektif, refleksi pengalaman pribadi, interpretasi makna bersama, hingga pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting dalam konteks perencanaan partisipatif karena memastikan bahwa setiap suara terdengar, setiap sudut pandang dihargai, dan keputusan yang diambil merupakan hasil konsensus kelompok, bukan dominasi segelintir pihak.

2.5.2.2. Metode *Workshop*

Metode *workshop* digunakan untuk pembuatan keputusan dalam kelompok. Dalam hal ini dibutuhkan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengorganisasi langkah-langkah tersebut, dan bagaimana mengevaluasi langkah-langkah tersebut secara bersama dalam kelompok.

Proses *workshop* pada dasarnya adalah mengajak seluruh anggota kelompok untuk mencurahkan ide, dimulai dari setiap individu kemudian berkelompok kecil dan pada akhirnya bersama-sama seluruh partisipan. Setiap individu, kelompok kecil dan juga seluruh partisipan bertanggung jawab terhadap ide-ide yang berkembang. Karena itu pada akhirnya, ide-ide yang disepakati bersama akan menjadi kesepakatan kelompok. Menurut Agustang (2006), terdapat lima langkah/tahap dalam melaksanakan workshop yaitu:

1. Tahap konteks. Membawa partisipan pada konteks masalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan fokus.
2. Tahap *brainstorming* (curah ide). Mengajak partisipan untuk menjawab focus tersebut dalam tiga tingkatan:
 - 1) Tingkat I (individual). Partisipan menuliskan beberapa ide ke dalam beberapa kartu kecil (kertas *metaplan*).
 - 2) Tingkat II (kelompok kecil). Partisipan membawa kartu kecil yang berisi ide-ide individual untuk didiskusikan kelompok kecil, satu kelompok kecil berdiskusi dan menghasilkan beberapa ide yang dipilih dari kartu-kartu individual.
 - 3) Tingkat III (pleno/kelompok besar). Setiap kelompok kecil membawa beberapa kartu kecil yang berisi ide dan ditempel di papan tulis.
3. Tahap kategorisasi (*clustering*). Mengelompokkan setiap ide ke dalam beberapa kelompok kategori sesuai dengan kemiripan masing-masing jawaban.
4. Tahap penamaan (*title*). Memberi judul pada setiap kelompok kategori sesuai maksud dominan yang dikandung oleh setiap ide dalam setiap kategori.
5. Tahap refleksi. Mengingat bahwa apa yang telah tertulis dalam kesepakatan kelompok, mengajak partisipan melihat implikasi dari setiap kesepakatan, jika perlu meninjau kembali dan akhirnya menguatkan sebagai kesepakatan yang dipahami bersama.

2.5.2.3. Metode Perencanaan Tindakan (*Action Plan*)

Metode perencanaan tindakan digunakan untuk membuat rencana rinci tindakan yang akan dilakukan oleh kelompok untuk melakukan kegiatan. Selain

untuk mem*breakdown* kegiatan, hal penting dari metode perencanaan tindakan adalah memastikan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan tugas/pekerjaan dan memastikan bahwa orang yang diserahi tugas mampu melaksanakannya (tidak sedang *overload* pekerjaan yang lain).

Agustang (2006), menjelaskan bahwa metode perencanaan tindakan memanfaatkan metode *workshop*. Dalam metode ini hasil yang dicapai dengan metode *workshop* akan lebih diperinci dan disistimatisasi, sehingga dapat dilaksanakan (operasional). Metode perencanaan tindakan memungkinkan:

1. Seluruh anggota kelompok dapat berpartisipasi dan berkontribusi.
2. Dihasilkannya rencana yang realistis dan juga dapat dilaksanakan.
3. Dapat dihasilkan buah pemikiran yang integratif melalui proses rasional dan intuitif.
4. Terbangunnya kesadaran multi-pihak/multi kepentingan (*stakeholdership*) pada anggota kelompok.
5. Teridentifikasinya mekanisme pertanggung-jawaban tugas dalam kelompok.
6. Teridentifikasinya informasi ketersediaan sumber daya dalam kelompok sehingga memudahkan pengalokasiannya.
7. Adanya mekanisme monitoring.

Metode perencanaan tindakan menekankan agar proses tidak berhenti hanya pada perencanaan. Tetapi, yang lebih penting, adalah rencana yang dihasilkan dijamin dapat diimplementasikan. Alur metode perencanaan tindakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Konteks

Seperti halnya pada metode diskusi ORID dan *workshop*, pada metode perencanaan tindakan ditentukan tujuan rasional atau tujuan objektif dan tujuan eksperimental.

- 1) Tujuan objektif meliputi apa saja yang hendak dicapai, dipahami atau diputuskan dalam proses perencanaan tindakan.
- 2) Tujuan eksperimental meliputi bagaimana situasi dan interaksi antar partisipan yang ingin dialami oleh partisipan selama proses perencanaan tindakan.

Pada tahap ini juga harus disepakati deskripsi aktivitas. Deskripsi aktivitas tersebut ditentukan dengan menjawab pertanyaan 5W+1H (*what, when, where, why, whom* dan *how*).

2. Tahap Lingkaran Sukses

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan pengertian mengenai sukses dari aktivitas yang akan direncanakan. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- 1) Menggali asumsi atau kesepakatan awal dari kelompok mengenai aktivitas yang akan dijalankan.
- 2) Menanyakan kepada kelompok, apa yang dibayangkan ketika kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah selesai dilakukan. Meliputi: apa yang ingin dilihat, apa yang ingin dirasakan, apa yang ingin dipikirkan, atau apa yang ingin didengar. Apa pula yang dibayangkan mengenai orang-orang yang diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan (kelompok sasaran kegiatan), apa

yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka nikmati.

- 3) Mencatat semua pendapat dari partisipan dalam suatu kertas, beri nama lingkaran sukses.

Dalam tahap lingkaran sukses ini yang harus dicapai adalah terjadinya tujuan-tujuan individu dari setiap partisipan, dan formulasi tujuan-tujuan itu menjadi tujuan kelompok. Pada akhir dari tahap ini, kelompok telah memiliki motivasi yang tinggi untuk meneruskan proses, menuju tercapainya tujuan yang disepakati bersama.

Salah satu cara untuk memeriksa kualitas dari tujuan yang ditetapkan adalah menggunakan kriteria SMART (*Specific-Measurable-Achievable-Realistic-Timebond*). Dalam metode ini kelompok memeriksa apakah tujuannya telah memenuhi kriteria SMART.

3. Tahap Kondisi Objektif

Tahap ini adalah tahap untuk mengidentifikasi kenyataan yang ada saat rencana dibuat. Pengetahuan mengenai hal itu penting agar seluruh partisipan memahami akan ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya (SDM, dana, dan sumber-sumber pendukung lain). Pada tahap ini pertanyaan yang harus dijawab adalah “berada dimana kita saat ini?”. Langkah-langkah pada tahapan ini diantaranya:

- 1) Buat dalam kertas kosong kondisi objektif. Dalam kondisi objektif terdapat empat kategori realitas, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

- 2) Tanyakan pada kelompok, apa saja kekuatan dan kelemahan kelompok, khususnya yang dianggap akan mempengaruhi rencana yang akan dibuat.
 - 3) Tanyakan pada kelompok, potensi peluang dan potensi ancaman apa saja akan didapat, jika rencana direalisasikan.
 - 4) Tulis respon partisipan, masukkan ke dalam kondisi objektif.
4. Tahap Komitmen

Tujuan dari tahap komitmen adalah untuk memastikan bahwa kelompok benar-benar ingin dan dapat melaksanakan rencana yang akan disusun. Sekali komitmen dilahirkan, kelompok harus bertanggung-jawab atas rencana yang akan dibuat (Agustang, 2006).